

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN TAPANULI UTARA

TAHUN 2024

TAHUN 2023

TARUTUNG

PKS

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	39
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	40
3.3 Program dan Kegiatan.....	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	54
BAB V PENUTUP.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses yang memegang peranan sangat penting bagi terlaksananya suatu kegiatan pembangunan yang baik. Perencanaan harus dijadikan suatu pedoman dan landasan bagi suatu kegiatan pembangunan, dan harus dilaksanakan secara baik dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi dan evaluasi terhadap kinerja dimasa yang lalu. Disamping itu perencanaan yang baik juga harus disesuaikan dengan visi dan misi dari pembangunan itu sendiri.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk itu setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa proses penyusunan Rencana Kerja OPD terdiri dari 6 (enam) tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Rencana kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja OPD juga merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi

Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dari uraian arti strategis mengenai Renja di atas, maka disusun Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dan disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara yang disusun berpedoman kepada Perubahan Renstra BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, yang dapat memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara dalam satu tahun anggaran. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintahan Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun berkenaan.

Renja BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara merupakan acuan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024. Adapun Visi Kabupaten Tapanuli Utara adalah “Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata”. Selain itu sebagai landasan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024 yang telah direncanakan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja BKPSDM kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 14. Peraturan presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

23. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pedoman dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Dasar pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara dalam kurun 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Menjabarkan Renstra BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 ke dalam rencana pembangunan tahunan;
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024;
3. Menyediakan pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran program dan kegiatan tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penulisan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada SPBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD tahun - tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah, yang berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah,

tantangan dan peluang serta formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD, yang merupakan peninjauan kembali terhadap rancangan Rencana Kerja Perubahan awal dengan perbandingan dengan Rencana Kerja Perubahan yang dilaksanakan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, yang menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para *stakeholder*, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan

tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PD
BAB IV PENUTUP, yang menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Bupati Kabupaten Tapanuli Utara untuk melaksanakan kebijakan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bagi PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut :

1. Program Kepegawaian Daerah

Kegiatan yang mendukung Program ini adalah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN, dengan Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah :

- a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
- b. Koordinasi dan Fasilitasi PNS dan PPPK;
- c. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
- d. Pengelolaan Data Kepegawaian

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan penerimaan ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK) Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Formasi PPPK yang diperoleh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan uraian berikut :

- Formasi PPPK Tenaga Guru berjumlah 430 Orang;
- Formasi PPPK Tenaga Kesehatan berjumlah 367 Orang;
- Formasi PPPK Tenaga Teknis berjumlah 346 Orang.

Untuk penyelenggaraan seleksi PPPK dilaksanakan di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan. Panitia pelaksanaan seleksi PPPK adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara.

Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian adalah pengurusan layanan pensiun baik pensiun sesuai Batas Usia Pensiun, Meninggal Dunia, Atas Permintaan Sendiri maupun Pensiun karena Uzur Jasmani/Rohani. Pada Tahun 2023 Surat Keputusan yang telah dikeluarkan sebagai berikut :

- Batas Usia Pensiuna berjumlah 304 Orang;
- Pensiun Permintaan Sendiri berjumlah 2 Orang;
- Pensiun karena Meninggal Dunia berjumlah 22 Orang;
- Pensiun Uzur Jasmani/Rohani berjumlah 1 Orang.

Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian mengakomodir kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan yang diatur Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pelaporan Harta Kekayaan terdiri dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN). Pada Tahun 2023 telah terlaksana pelaporan LHKPN dan LHKAN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Pelaporan LHKPN berjumlah 126 Laporan dan Pelaporan LHKAN berjumlah 1892 Laporan.

Selanjutnya pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN dan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN.

Pengelolaan Mutasi ASN adalah kegiatan mutasi atau pindah keluar dari Kabupaten Tapanuli Utara dan Pindah masuk ke Kabupaten Tapanuli Utara. Pada Tahun 2023 jumlah PNS yang pindah masuk atau pindah keluar maupun pergeseran adalah sebagai berikut :

- Pindah Masuk berjumlah 37 Orang;
- Pindah Keluar berjumlah 12 Orang;
- Pergeseran berjumlah 200 Orang.

Kenaikan pangkat PNS terlaksana dua kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Adapun Kenaikan Pangkat yang diusulkan selesai semua sesuai waktu yang ditentukan meliputi :

- a. Periode April 2023 sebanyak 542 Orang yang terdiri dari :
 - Golongan IV sebanyak 114 Orang
 - Golongan III sebanyak 428 Orang
- b. Periode Oktober 2023 sebanyak 638 Orang yang terdiri dari :
 - Golongan IV sebanyak 101 Orang
 - Golongan III sebanyak 537 Orang

Untuk Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN meliputi beberapa Sub Kegiatan antara lain :

- a. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN;
- b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
- c. Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN.

Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Peningkatan Kapasitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2023 telah terlaksana dengan memfasilitasi ASN untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang meliputi :

- Diklat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C dilaksanakan di Pusat Diklat Nasional berjumlah 20 Orang;
- Diklat Kepamongprajaan bagi Camat Kabupaten/Kota dilaksanakan di BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan BPSDM Kementerian Dalam Negeri berjumlah 3 Orang;
- Diklat Teknis bagi Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja untuk Mendukung Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Tahun 2024 Angkatan III dan IV di BPSDM Kementerian Dalam Negeri berjumlah 2 orang;

- Diklat Legal Drafting (Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) dilaksanakan di BPSDM Kementerian Dalam Negeri berjumlah 5 Orang;
- Bimtek Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara berjumlah 3 Orang;
- Diklat Pembentukan PPNS Perhubungan Darat Poltrada Bali Kementerian Perhubungan RI Angk. XXIII TA. 2023 dilaksanakan di Diklat Reserse LemDiklat POLRI berjumlah 1 Orang;
- Diklat Penggunaan Router Mikrotik dan perangkat kerasnya dilaksanakan di Mikrotik Certified Training Partner berjumlah 2 Orang.

Untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, adalah Sub Kegiatan yang memfasilitasi Pendidikan Lanjutan bagi ASN pada Tahun Anggaran 2023 yang meliputi :

- Pemberian Bantuan Pendidikan bagi PNS Strata 3 berjumlah 2 Orang;
- Pemberian Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Ikatan Dinas Kementerian Pola Pembibitan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara pada Politeknik Transportasi berjumlah 6 Orang;
- Pemberian Izin Belajar Strata 1 berjumlah 18 Orang;
- Pemberian Izin Belajar Strata 2 berjumlah 12 Orang;
- Pemberian Izin Belajar Profesi berjumlah 8 Orang;
- Pemberian Tugas belajar berjumlah 1 Orang.

Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN, adalah Sub Kegiatan yang memfasilitasi Seleksi Terbuka, terdapat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut :

- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara yang dalam keadaan lowong

karena pejabat yang lama telah memasuki Batas Usia Pensiun TMT 01 November 2022;

- Staf Ahli Bupati Tapanuli Utara Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam keadaan lowong karena pejabat lama memasuki Batas Usia Pensiun TMT 01 Mei 2023.

Maka Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Tapanuli Utara untuk 2 (dua) jabatan dilaksanakan mulai tanggal 24 Februari 2023 s.d. 01 Maret 2023 bertempat di Aula Hotel Perdana Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Tapanuli Utara setelah terdahulu memperoleh rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Selanjutnya pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan sub kegiatan :

- a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
- b. Pemberian Tanda Jasa bagi Pegawai;
- c. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dilaksanakan dengan memberikan pembimbingan bagi ASN untuk menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN serta untuk tertib administrasi, bahwa Setiap Aparatur Sipil Negara wajib membuat SKP melalui aplikasi e-Kinerja BKN.

Pemberian Tanda Jasa bagi Pegawai dilaksanakan pada Hari Kemerdekaan Indonesia pada Tanggal 17 Agustus 2023 dengan memberikan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada ASN yang telah lama mengabdikan berjumlah 236 Penghargaan dengan rincian berikut :

- Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun berjumlah 71 Orang;
- Penghargaan Satyalencana Karya Satya 20 Tahun berjumlah 65 Orang;
- Penghargaan Satyalencana Karya Satya 30 Tahun berjumlah 100 Orang.

Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN mengakomodir penyelesaian pelanggaran disiplin ASN dengan kasus yang terselesaikan sebagai berikut :

- Pemberhentian Sementara berjumlah 2 Kasus;
- Pembinaan akibat ketidakhadiran berjumlah 3 Kasus;
- Perceraian berjumlah 1 Kasus.

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan yang mendukung Program ini adalah Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan. Pada Sub Kegiatan tersebut telah terlaksana Diklat Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Pelatihan Dasar CPNS telah dilaksanakan kepada CPNS Angkatan 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Pelatihan Dasar ini diikuti oleh 40 orang CPNS yang diselenggarakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara secara Blended Learning. Peserta pelatihan memperoleh kelulusan dari hasil pelatihannya untuk syarat agar CPNS dapat diangkat menjadi PNS.

Diklat Kepemimpinan telah dilaksanakan kepada PNS yang menduduki Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2023 yang meliputi :

- Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)

Pelatihan Kepemimpinan Nasional diikuti oleh 3 Orang PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II) yang dilaksanakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Peserta Pelatihan telah memperoleh kelulusan dari pelatihan tersebut.

- Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)
Pelatihan Kepemimpinan Administrator diikuti oleh 1 Orang PNS yang menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) yang dilaksanakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Peserta Pelatihan telah memperoleh kelulusan dari pelatihan tersebut.
- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas diikuti oleh 5 Orang PNS yang menduduki Jabatan Pengawas (Eselon IV) yang dilaksanakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Peserta Pelatihan telah memperoleh kelulusan dari pelatihan tersebut.

Pada Realisasi Program dan Kegiatan terdapat beberapa target yang terpenuhi, namun terdapat juga beberapa target yang tidak tercapai. Faktor tidak tercapai disebabkan beberapa hal, antara lain disebabkan oleh regulasi maupun kondisional, menyangkut tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai unsur pelayanan di bidang kepegawaian. Namun secara keseluruhan dinamika penguasaan capaian merupakan kebutuhan didalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kepegawaian untuk tercapainya pelayanan yang lebih baik.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut di atas adalah untuk penyusunan Renstra ke depan akan dilakukan perbaikan penyusunan target indikator program/kegiatan dan pengawalan capaiannya yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran sampai evaluasinya.

Tabel T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN TAPANULI UTARA

SKPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	KEPEGAWAIAN									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	300 Persen	300%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	9 Jenis	300%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	15 Dokumen	250%

					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	6	Laporan	600%
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	4	Laporan	2	Laporan	4	Laporan	200%	2	Laporan	10	Laporan	500%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	Jenis	3	Jenis	4	Jenis	3	Jenis	75%	4	Jenis	10	Jenis	250%
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	32	Orang/Bulan	32	Orang/Bulan	32	Orang/Bulan	32	Orang/Bulan	100%	32	Orang/Bulan	96	Orang/Bulan	300%
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	15	Dokumen	23	Dokumen	153%
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	Laporan	300%
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	0	Laporan	4	Laporan	0	Laporan	0%	12	Laporan	12	Laporan	100%
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Jenis	1	Jenis	1	Jenis	1	Jenis	100%	1	Jenis	1	Jenis	100%

					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan	3	Laporan	4	Laporan	3	Laporan	75%	3	Laporan	9	Laporan	300%
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	Jenis		Jenis	0	Jenis	0	Jenis	0%	0	Jenis	0	Jenis	0%
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	31	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0%	0	Paket	0	Paket	0%
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0%	0	Orang	0	Orang	0%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	Jenis	7	Jenis	7	Jenis	7	Jenis	100%	7	Jenis	7	Jenis	100%
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2	Paket	12	Bulan	2	Paket	2	Paket	100%	2	Paket	16	Paket	800%
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Paket	12	Bulan	4	Paket	4	Paket	100%	4	Paket	20	Paket	500%
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2	Paket	2	Paket	2	Paket	2	Paket	100%	2	Paket	6	Paket	300%
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2	Paket	2	Paket	2	Paket	2	Paket	100%	2	Paket	6	Paket	300%
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3	Dokumen	12	Bulan	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	3	Dokumen	18	Dokumen	600%
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	300%

					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70	Laporan	12	Bulan	12	Laporan	12	Laporan	100%	50	Laporan	74	Laporan	106%
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	100%	2	Jenis	2	Jenis	67%
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	1	Unit	1	Unit	0%
					Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	5	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	0	Unit	1	Unit	20%
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	9	Unit	4	Unit	3	Unit	3	Unit	100%	7	Unit	14	Unit	156%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	100%	3	Jenis	3	Jenis	100%
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	10	Laporan	34	Laporan	340%
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	300%
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	300%
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	100%	3	Jenis	3	Jenis	75%

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	6 Unit	300%
				Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	5 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	24 Unit	48 Unit	200%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	300%
				Program Kepegawaian Daerah	Persentase Tingkat Kelengkapan Data dan Informasi Kepegawaian	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	300 Persen	300%
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	6 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	12 Jenis	200%
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	41 Dokumen	1500 Dokumen	2043 Dokumen	136%	1 Dokumen	2085 Dokumen	208500%

					Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	270	Dokumen	0	Dokumen	265	Dokumen	287	Dokumen	108%	313	Dokumen	600	Dokumen	222%
					Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	1	Lembaga	1	Lembaga	1	Lembaga	1	Lembaga	100%	1	Lembaga	3	Lembaga	300%
					Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	2500	Dokumen	0	Dokumen	1500	Dokumen	0	Dokumen	0%	2500	Dokumen	2500	Dokumen	100%
					Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	50%
					Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	100%	3	Jenis	3	Jenis	100%
					Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	100	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	100	Dokumen	100	Dokumen	100%
					Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	900	Dokumen	1239	Dokumen	900	Dokumen	986	Dokumen	100%	900	Dokumen	3125	Dokumen	338%
					Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	18	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	18	Dokumen	18	Dokumen	100%
					Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	100%	3	Jenis	3	Jenis	100%
					Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN	50	Orang	4	Orang	204	Orang	204	Orang	100%	50	Orang	258	Orang	516%

					Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	3 Orang	3 Orang	3 Orang	177 Orang	100%	3 Orang	183 Orang	6100%
					Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	10 Orang	3 Orang	10 Orang	34 Orang	100%	160 Orang	197 Orang	1970%
					Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	1 Jenis	100%
					Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Aparatur Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	10 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	10 Orang	10 Orang	100%
					Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	15 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	15 Orang	15 Orang	100%
					Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	1 Orang	3 Orang	15 Orang	15 Orang	0%	1 Orang	19 Orang	1900%
					Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	7 Laporan	100%	1 Laporan	8 Laporan	800%
					Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara selama Tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pelayanan yang telah dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka terlaksananya tugas pokok dan fungsinya yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugasnya.

Tabel T-C.30

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Profesionalitas ASN	IP ASN	N/A	36,43 Poin	37,29 Poin	38 Poin	39 Poin	36,43 Poin	37,29 Poin	60,30 Poin	38 Poin	39 Poin	
3	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Nilai AKIP	70 Poin	70 Poin	70 Poin	73 Poin	75 Poin	54,82 Poin	64,75 Poin	68,00 Poin	73 Poin	75 Poin	
2	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	SDGs	2 Orang	3 Orang	3 Orang	4 Orang	5 Orang	2 Orang	3 Orang	2 Orang	4 Orang	5 Orang	

Misi yang menjadi urusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara adalah misi kedelapan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Sistem E-Government”. Indeks Profesionalitas ASN menjadi indikator pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024. Dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang menjadi urusan/ kewenangan BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara yaitu Indeks Profesionalitas ASN dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Maka pada Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2024 mempunyai indikator capaian Indeks Profesionalitas ASN, Nilai Hasil Evaluasi AKIP dan Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). Untuk realisasi capaian tahun 2023 Penilaian Indeks Profesionalitas ASN masih dilakukan perhitungan oleh Badan Kepegawaian Negara. Untuk Nilai Hasil Evaluasi AKIP masih dalam proses penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara adalah memproses administrasi kepegawaian di daerah. Pelayanan kepegawaian mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dan era globalisasi.

Tingkat kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara sejauh ini cukup baik, hal ini dapat dilihat dari hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan setiap tahunnya. Capaian kinerja sebagian besar kegiatan menunjukkan persentase yang cukup bagus sesuai dengan yang telah ditargetkan. Namun demikian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, antara lain :

1. Sistem Rekrutmen dan penetapan formasi untuk pengadaan aparatur belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan riil organisasi;
2. Penempatan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi;
3. Belum optimalnya dan terintergrasinya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian;
4. Perubahan dan perkembangan peraturan bidang kepegawaian yang harus ditangani secara cepat dan tepat;
5. Masih kurangnya profesionalisme sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan yang baik, bersih dan melayani;
6. Disiplin aparatur masih lemah dan perlu peningkatan dengan pemberian reward dan punishmen yang seimbang.

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan komponen penting dalam tata laksana kegiatan pemerintahan, profesionalisme ASN seringkali

dipertanyakan karena profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya ;

2. Pengelolaan manajemen ASN belum sepenuhnya berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras agama, asal usul, jenis kelamin dan kondisi kecacatan ;
3. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik masih menemui beberapa tantangan besar, salah satunya adalah rendahnya kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik ;
4. Kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat ;
5. Akuntabilitas aparatur pemerintah merupakan hal yang mutlak dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka good governance.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara yang memuat program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada Rancangan awal RKPD dan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Anggaran Belanja Langsung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada Tahun 2019 Rancangan Awal RKPD Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari 5 (Lima) Program dan 17 (tujuh belas) kegiatan.
- b. Pada Tahun 2020 Rancangan Awal RKPD Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari 5 (Lima) Program dan 15 (lima belas) kegiatan.
- c. Pada tahun 2021 Rancangan Awal RKPD Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari 3 (tiga) Program dan '10 Kegiatan dengan 39 Sub Kegiatan.

- d. Pada tahun 2022 jumlah program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 (tiga) program dan 12 kegiatan dengan 39 sub kegiatan.
- e. Pada tahun 2023 jumlah program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 (tiga) program dan 13 kegiatan dengan 41 sub kegiatan.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disempurnakan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menstandarkan program, kegiatan dan sub kegiatan di seluruh Indonesia melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang diharapkan melalui aplikasi ini akan dengan mudah didapatkan data pembangunan secara massif serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standart Harga Satuan Regional dalam merencanakan pendanaannya.

Tabel T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAPANULI UTARA

No	Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bidang Urusan : Kepegawaian					Bidang Urusan : Kepegawaian					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani	100 Persen	3,941,062,300	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani	100 Persen	4,842,062,300	
	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Jenis	19,500,000	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Jenis	22,000,000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6,000,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6,000,000	

3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	9,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	10,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	Jenis	2,816,575,200	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	Jenis	2,954,575,200	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	32	Orang/Bulan	2,750,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	32	Orang/Bulan	2,887,500,000	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15	Dokumen	55,075,200	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15	Dokumen	55,075,200	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	6,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	6,000,000	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	5,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	6,000,000	
	Admisitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Jenis	3,500,000	Admisitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Jenis	5,000,000	
8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan	3,500,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan	5,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	Jenis	230,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	Jenis	235,000,000	

9	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	31	Paket	30,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	31	Paket	35,000,000
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400	Orang	200,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400	Orang	200,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	Jenis	383,500,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	Jenis	405,000,000
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2	Paket	5,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2	Paket	10,000,000
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Paket	60,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Paket	60,000,000
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2	Paket	10,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2	Paket	13,000,000
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2	Paket	27,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2	Paket	30,000,000
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3	Dokumen	16,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3	Dokumen	16,000,000
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	12	Laporan	5,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	12	Laporan	6,000,000
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70	Laporan	260,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70	Laporan	270,000,000

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	Jenis	220,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	Jenis	920,000,000	
18	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Unit	650,000,000	Mengingat Kendaraan Dinas Jabatan yang lama tidak efisien untuk dipergunakan dalam pelaksanaan tugas di dalam daerah dan luar daerah
19	Pengadaan Mebel	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Mebel	5	Unit	100,000,000	Pengadaan Mebel	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Mebel	5	Unit	150,000,000	
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	9	Unit	120,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	9	Unit	120,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Jenis	64,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Jenis	86,500,000	
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	Laporan	500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	Laporan	500,000	
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	7,500,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	30,000,000	
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	56,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	56,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Jenis	203,987,100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Jenis	213,987,100	

24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	Unit	60,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	Unit	80,000,000
25	Pemeliharaan Mebel	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	5	Unit	50,000,000	Pemeliharaan Mebel	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	5	Unit	30,000,000
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24	Unit	43,987,100	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24	Unit	43,987,100
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	60,000,000
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Persentase Tingkat Kelengkapan Data dan Informasi Kepegawaian	100	Persen	2,325,000,000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Persentase Tingkat Kelengkapan Data dan Informasi Kepegawaian	100	Persen	3,455,000,000
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	6	Jenis	965,000,000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	6	Jenis	745,000,000
28	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	30,000,000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	30,000,000
29	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Dokumen	500,000,000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Dokumen	500,000,000
30	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	270	Dokumen	35,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	270	Dokumen	35,000,000

31	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	1	Lembaga	100,000,000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	1	Lembaga	100,000,000	
32	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	2500	Dokumen	200,000,000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	2500	Dokumen	30,000,000	
33	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terkelolanya Data Kepegawaian	2	Dokumen	100,000,000	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terkelolanya Data Kepegawaian	2	Dokumen	50,000,000	
	Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	3	Jenis	160,000,000	Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	3	Jenis	140,000,000	
34	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	100	Dokumen	35,000,000	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	100	Dokumen	35,000,000	
35	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	900	Dokumen	75,000,000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	900	Dokumen	75,000,000	
36	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	18	Dokumen	50,000,000	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	18	Dokumen	30,000,000	
	Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	3	Jenis	885,000,000	Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	3	Jenis	2,230,000,000	
37	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Meningkatnya Kapasitas ASN	50	Orang	300,000,000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Meningkatnya Kapasitas ASN	150	Orang	1,100,000,000	
38	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	3	Orang	85,000,000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	11	Orang	430,000,000	

39	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	10 Orang	500,000,000	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	4 Orang	700,000,000	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		315,000,000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6 Jenis	340,000,000	
40	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Aparatur Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	200,000,000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Aparatur Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	200,000,000	
41	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	10 Orang	20,000,000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	10 Orang	20,000,000	
42	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	15 Orang	30,000,000	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	20 Orang	30,000,000	
43	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Meningkatnya Disiplin ASN	1 Orang	15,000,000	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Meningkatnya Disiplin ASN	15 Orang	30,000,000	
44	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	30,000,000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	40,000,000	
45	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	1 Dokumen	20,000,000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	2 Dokumen	20,000,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Persentase Aparatur Mengikuti Diklat Struktural	24 Persen	1,475,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Persentase Aparatur Mengikuti Diklat Struktural	24 Persen	1,475,000,000	
			Persentase Aparatur Mengikuti Diklat Teknis	13 Persen				Persentase Aparatur Mengikuti Diklat Teknis	13 Persen		
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2 Jenis	1,475,000,000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2 Jenis	1,475,000,000	

46	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2	Laporan	1,475,000,000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	700	Laporan	1,475,000,000	
	TOTAL					7,741,062,300						9,772,062,300	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, sehingga sesuai dengan tupoksinya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tidak mengakomodir usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020- 2024, dijabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut: VISI : “Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden, untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”.

MISI :

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – digital bureaucracy;
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global;
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel;
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas;
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani;
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan pelayanan pemerintahan umum menjadi bagian dari Perangkat Daerah yang mengemban amanah untuk mewujudkan misi ke 8 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yaitu “Meningkatkan Kualitas Pelayan Publik Dengan Sistem E-Government”. Dalam lingkup bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, misi ini

mengisyaratkan perlunya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku unsur penunjang bidang Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan dan informasi yang transparan kepada masyarakat khususnya ASN.

Terhadap kebijakan nasional, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai posisi untuk mendukung prioritas pembangunan untuk Pembangunan Manusia melalui penyiapan aparatur yang berkompeten melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembangunan manajemen kepegawaian dengan profesional yang memberikan kepastian kepada aparatur untuk berkarir secara jelas dan adil, dengan menerapkan pembinaan dan mengusahakan kesejahteraan kepada aparatur sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Masih rendahnya profesionalisme ASN. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Maka Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara adalah **meningkatkan kualitas ASN yang**

Profesional dan Berintegritas, dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN
2. Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagaimana dipahami bersama bahwa tujuan dan sasaran sebagai bagian perencanaan strategi adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi yang dapat diukur dengan baik, dirumuskan dalam program serta dijabarkan dalam aktifitas atau kegiatan yang disusun dalam dimensi waktu (tahunan). Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara ditunjang dengan 3 (tiga) program yang berhubungan dengan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang wajib harus diterapkan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2022 dengan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri.

Adapun secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari kegiatan, sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan

- b. Pemeliharaan Mebel
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Pada Program Kepegawaian Daerah terdiri dari kegiatan, sebagai berikut :

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - b. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - c. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - d. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - e. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - f. Pengelolaan Data Kepegawaian
2. Mutasi dan Promosi ASN
 - a. Pengelolaan Mutasi ASN
 - b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - c. Pengelolaan Promosi ASN
3. Pengembangan Kompetensi ASN
 - a. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - c. Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - b. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
 - c. Pembinaan Disiplin ASN
 - d. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari kegiatan, sebagai berikut :

1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

Berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2024 telah merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2024.

Program dan kegiatan tersebut merupakan hasil penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan OPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional. Perumusan program dan kegiatan telah mempertimbangkan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan untuk prakiraan maju pada Tahun 2024 dan hasil perhitungan kebutuhan dana atau pagu indikatif untuk prakiraan maju dengan mempertimbangkan kemungkinan angka inflasi. Rumusan rencana program dan kegiatan tersebut disajikan dalam Tabel T-C.33.

Tabel T-C.33

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	100 Persen	Rp3,547,269,749				Rp3,724,633,236
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	3 Jenis	Rp22,000,000	DAU		3 Jenis	Rp23,100,000

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	6	Dokumen	Rp6,000,000	DAU		6	Dokumen	Rp6,300,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	1	Laporan	Rp6,000,000	DAU		1	Laporan	Rp6,300,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	2	Laporan	Rp10,000,000	DAU		2	Laporan	Rp10,500,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	4	Jenis	Rp2,564,075,200	DAU		4	Jenis	Rp2,692,278,960
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	32	Orang/Bulan	Rp2,500,000,000	DAU		32	Orang/Bulan	Rp2,625,000,000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	15	Dokumen	Rp55,075,200	DAU		15	Dokumen	Rp57,828,960

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	1	Laporan	Rp6,000,000	DAU		1	Laporan	Rp6,300,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	12	Laporan	Rp3,000,000	DAU		12	Laporan	Rp3,150,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	1	Jenis	Rp5,000,000	DAU		1	Jenis	Rp5,250,000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	3	Laporan	Rp5,000,000			3	Laporan	Rp5,250,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	7	Jenis	Rp285,000,000	DAU		7	Jenis	Rp299,250,000

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	2	Paket	Rp10,000,000	DAU		2	Paket	Rp10,500,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	4	Paket	Rp50,000,000	DAU		4	Paket	Rp52,500,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	2	Paket	Rp13,000,000	DAU		2	Paket	Rp13,650,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	2	Paket	Rp30,000,000	DAU		2	Paket	Rp31,500,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	3	Dokumen	Rp16,000,000	DAU		3	Dokumen	Rp16,800,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	12	Laporan	Rp6,000,000	DAU		12	Laporan	Rp6,300,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	70	Laporan	Rp160,000,000	DAU		70	Laporan	Rp168,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	3	Jenis	Rp420,000,000	DAU		3	Jenis	Rp441,000,000

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	1	Unit	Rp300,000,000	DAU	Mengingat Kendaraan Dinas Jabatan yang lama tidak efisien untuk dipergunakan dalam pelaksanaan tugas di dalam daerah dan luar daerah	1	Unit	Rp315,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	9	Unit	Rp120,000,000	DAU		9	Unit	Rp126,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	3	Jenis	Rp101,194,549	DAU		3	Jenis	Rp106,254,276
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	10	Laporan	Rp500,000	DAU		10	Laporan	Rp525,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	12	Laporan	Rp44,694,549	DAU		12	Laporan	Rp46,929,276
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	12	Laporan	Rp56,000,000	DAU		12	Laporan	Rp58,800,000

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	4	Jenis	Rp150,000,000	DAU		4	Jenis	Rp157,500,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	1	Unit	Rp70,000,000	DAU		1	Unit	Rp73,500,000
	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	5	Unit	Rp10,000,000	DAU		5	Unit	Rp10,500,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	24	Unit	Rp40,000,000	DAU		24	Unit	Rp42,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	1	Unit	Rp30,000,000	DAU		1	Unit	Rp31,500,000
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Tingkat Kelengkapan Data dan Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	100	Persen	Rp1,380,000,000	DAU				Rp1,449,000,000
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	6	Jenis	Rp305,000,000	DAU		6	Jenis	Rp320,250,000

	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	1	Dokumen	Rp30,000,000	DAU		1	Dokumen	Rp31,500,000
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	1	Dokumen	Rp150,000,000	DAU		1	Dokumen	Rp157,500,000
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	270	Dokumen	Rp35,000,000	DAU		270	Dokumen	Rp36,750,000
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	1	Lembaga	Rp50,000,000	DAU		1	Lembaga	Rp52,500,000
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	2500	Dokumen	Rp30,000,000	DAU		2500	Dokumen	Rp31,500,000
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	2	Dokumen	Rp10,000,000	DAU		2	Dokumen	Rp10,500,000
	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	3	Jenis	Rp90,000,000	DAU		3	Jenis	Rp94,500,000
	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	100	Dokumen	Rp25,000,000	DAU		100	Dokumen	Rp26,250,000

	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	900	Dokumen	Rp50,000,000	DAU		900	Dokumen	Rp52,500,000
	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	18	Dokumen	Rp15,000,000	DAU		18	Dokumen	Rp15,750,000
	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	3	Jenis	Rp900,000,000	DAU		3	Jenis	Rp945,000,000
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	150	Orang	Rp500,000,000	DAU		150	Orang	Rp525,000,000
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	11	Orang	Rp300,000,000	DAU		11	Orang	Rp315,000,000
	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	4	Orang	Rp100,000,000	DAU		4	Orang	Rp105,000,000
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	6	Jenis	Rp85,000,000	DAU		6	Jenis	Rp89,250,000
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Aparatur Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	1	Dokumen	Rp20,000,000	DAU		1	Dokumen	Rp21,000,000

	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	20 Orang	Rp15,000,000	DAU		20 Orang	Rp15,750,000
	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	15 Orang	Rp20,000,000	DAU		15 Orang	Rp21,000,000
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	5 Laporan	Rp30,000,000	DAU		5 Laporan	Rp31,500,000
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia								
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	2 Jenis	Rp1,440,522,254	DAU		2 Jenis	Rp1,512,548,367
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	700 Laporan	Rp1,440,522,254	DAU		700 Laporan	Rp1,512,548,367
Total					Rp6,367,792,003				Rp6,686,181,603

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Akan tetapi Dana Alokasi Umum yang diberikan Pemerintah Pusat seiring dengan kondisi perekonomian tahun 2019 yang terganggu akibat adanya pandemi Covid-19 memaksa Pemerintah Daerah untuk bijak dalam membagi alokasi dananya untuk mendukung prioritas penanganan pemulihan perekonomian masyarakat.

Rencana kerja dan pendanaan BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Utara.

Namun demikian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara masih mengusulkan tambahan anggaran untuk beberapa sub kegiatan yang sangat mendesak dan menunggu persetujuan. Adapun sub kegiatan yang mendesak tersebut adalah pelaksanaan Penerimaan Seleksi Aparatur Sipil Negara yang pelaksanaannya menunggu kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi) serta anggaran untuk pelaksanaan Seleksi Terbuka JPTP guna mengisi kekosongan jabatan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh pejabat struktural dan seluruh staf BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

Penyusunan Renja ini disamping bertujuan untuk melakukan pengukuran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, juga sebagai upaya sistematis terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tarutung, November 2023

KEPALA BKPSDM
KABUPATEN TAPANULI UTARA,



BENYAMIN NABABAN, S.Pd, MM

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 198212122006041006